

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardiansyah, 2022. *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Asmara, Galang., Retno Mawarini Sukmariningsih, et.al., 2025. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Hamzah, Herdiansyah, 2024, *Hukum Sumber Daya Alam: Prinsip-Prinsip Hukum Berbasis Adjudikasi Konstitusional*, Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Haryati, Dwi., Mailinda Eka Yuniza, Richo Andi Wibowo, et.al., 2024. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers.
- HR, Ridwan., 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul., 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mochtar, Zainal Arifin., 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: Buku Mojok Group.
- Muhdar, Muhamad., 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press.
- Pratiwi, Cekli Setya., Christina Yulita, et.al., 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Sumardjono, Maria S.W., 2021. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suteki, Galang Taufani, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuniza, Mailinda Eka., Marsudi Triatmodjo, Agustina Merdekawati, et.al. 2022. *Pengantar Hukum Energi*, Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Apriliyanti, Kiki., Darlin Rizki, "Kebijakan Energi Terbarukan: Studi Kasus Indonesia dan Norwegia dalam Pengelolaan Sumber Energi Berkelanjutan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 49, No. 2, 2023: 186-209.
- Argoebie, Bella., Syahwa Fitria Kurniawan, et.al., "Energi terbarukan dan global: kepemimpinan Jerman dalam transisi Energi dunia," *Journal of Education, Cultural and Politics*, Vol. 5, No. 3, 2025: 461-472.
- Arifin, Ridwan., Ali Masyhar Mursyid, Benny Sumardiana, Diandra Preludio Ramada, Ubaidillah Kamal, dan Sultoni Fikri. "Indonesian sustainable development policy: How the government ensures the environment for

- future generations”, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1355, 2024: 1-6.
- Arinaldo, Deon., Erina Mursanti, and Fabby Tumiwa, “Implikasi Paris Agreement Terhadap Masa Depan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Di Indonesia,” *Discussion Paper*, Juli 2019: 1-12.
- Astariyani, “Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 4, no. 4, 2015: 688-699.
- Azhar, Muhamad., dan Dendy Adam Satriawan, “Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional,” *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 1, no. 4, 2018: 398-412.
- Cherp, Aleh., Vadim Vinichenko, Jessica Jewell, et.al., “Comparing electricity transitions: A historical analysis of nuclear,” *Energy Policy 101*, 2017: 612-628.
- Dinatha, Hendra., Fauzie Yusuf Hasibuan, and Basuki Rekso Wibowo, “Analysing the Legal Dynamic Involved in the Development of New Renewable Energy in Indonesia, Focussing on Regulations and the Challenges Faced During Implementation,” *International Journal of Law, Crime and Justice*, vol. 1, no. 3, 2024: 322-338.
- Donanita, Tysa., Rini Fidianti, et. al., “Potensi Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Kalimantan Timur Menghadapi Krisis Energi Di Indonesia,” *Samarinda: Prosiding Seminar Nasional BSKJI Post Pandemic Economy Recovery*, Edisi 3, vol. 1, 2022: 1-10.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy., dan Irma Aulia Pertiwi Nusantara, “Irisan Penguasaan Negara dan Desentralisasi dalam Prospek Pengaturan Energi Terbarukan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 21, issue 1, 2024: 118-140.
- Faisal, “Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional,” *Ensiklopedia Social Review*, vol. 3, no. 1, 2021: 18–24.
- Fristikawati, Yanti., and Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, Dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum,” *Jurnal Justisia* vol. 7, no. 2, 2022: 375–89.
- Hadiyono, Wahyu Cahyo., Yulia Kurniaty, dan Dilli Trisna Noviasari, “Analisa Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik berbasis Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik,” *Borobudur Law and Society Journal*, vol. 2, no. 3, 2023: 118-127.
- Halilah, Siti., dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no 2, 2021: 56-65.

- Handalus, Fitri Andalus., dan Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, vol. 11, no. 1, 2019: 1–11.
- Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist*, vol. 3, no. 2, 2020: 99-115.
- Hidayat, Candra Nur., dan Serena Ghean Niagara, "Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Wewenang Pemerintah Daerah di Tinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berdasarkan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, 2022: 146-160.
- Hsb, Ali Marwan., dan Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15, no. 2, 2018: 1-8.
- Hudi, Ryan Martha., "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan UU Otonomi Daerah," *Indragiri Law Review*, vol. 2, no. 2, 2024: 80-86.
- Hutasoit, Wesley Liano., "Analisa Pemindahan Ibukota Negara," *Dedikasi*, vol. 19, no. 2, 2018: 108-128.
- Irianto, Dhafin Faza., "Desentralisasi Energi: Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Energi Terbarukan di Tingkat Daerah." *Jurnal Locus Delicti*, vol. 4, no. 2, 2023: 121-136.
- Iskandar, Andi Nur Charisma Putri., Devan Filia Pratama, and Muhamad Muhdar, "Transformasi Energi Indonesia: Konstelasi Geopolitik dan Pengaturan untuk Energi Terbarukan," *Jurnal de Jure*, vol. 14, no. 1, 2022: 18–28.
- Iqbal, Firdaus Muhamad., "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 4, no. 2, 2022: 180-200.
- Jacobsson, Staffan., and Anna Bergek, "Transforming the Energy Sector: The Evolution of Technological in Renewable Energy Technology," *Environmental Policy Research Centre*, 2004: 208-236.
- Kasbohrer, Andrea., Karoline S. Rogge, Hans-Martin Zademach, "Regulatory state capacity for accelerating not-zero transitions: Lessons learned from governing electricity storage in Germany," *Energy Policy* 205, 114659, 2025: 1-18.
- Kennedy, Alexander., William Hartato Surya, et.al., "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, vol. 5, no. 2, 2024: 558–569.
- Kurniawan, Denis., "Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah," *Jurnal Konstitusi*, vol. 22, no 1, 2025: 178-205.

- Kusnandar, Giusna Dipankara., I Nyoman Satya Kumara, and I Wayan Sukerayasa, "Pengaruh Kebijakan, Regulasi, Dan Anggaran Terhadap Perkembangan Kapasitas PLTS Di Australia," *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, vol. 20, no. 2, 2021: 1-12.
- Liao, Liao., and Chunyu Shi, "Multi-level Governance in Centralized State? Evidence from China after the Territorial Reforms," *Lex-Localis – Journal of Local Self-Government*, vol. 20, no. 1, 2022: 1-26. hlm. 21.
- Lowi, Theodore J., "Four Systems of Policy, Politics, and Choice," *Administration Review*, vol. 32, no. 4, 1972: 298-310.
- Meerbeek, Jérémie Van., "The Principle in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust," *European Law Review*, vol. 4, no. 41, 2016: 275-288.
- Meilani, Retno., dan Vina Hardyana Infantri, "Analisis Kekaburan Norma Hukum dan Risiko Maladministrasi dalam Tata Kelola BPI Danantara," *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2025: 668-683.
- Narindra, Janitra Syena., dan Budi Ispriyarso, "Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penggunaan Diskresi pada Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 3, 2022: 418-432.
- Nasution, Sutan Rais Aminullah., Agusmidah, dan Amsali Syahputra Sembiring, "Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah dalam Pemerintah Daerah menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 1, no. 1, 2022: 140-153.
- Novikasari, Siti Rahma., "Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Green Tax Reform," *Jurnal Hukum Quia Iustum*, vol. 30, no. 3, 2023: 497-514.
- Nur, Sri., dan Hari Susanto, "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi," *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 2, 2019: 206-2017.
- Nurdin, M. Rizki., "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," *Lex Renaissance*, vol. 7, no. 3, 2022: 617-633.
- Nurfurqon, Ardika., "Politik Hukum Otonomi Daerah: Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia," *Khazanah Hukum*, vol. 2, no. 2, 2020: 73-81.
- Pangestu, Regina Citra Kurnia., dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi, "Pengaruh Konsumsi Energi Sektor Industri, Rumah Tangga, dan Transportasi terhadap Emisi Karbon di Indonesia," *Inisiatif*, vol. 3, no. 4, 2024: 297-311.
- Pratama, Fachrizza Sidi., "Fenomena Rechtsvacuum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 terkait Masa

- Perpanjang Paspur Menjadi 10 Tahun,” *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1, No. 1, 2019: 51-58.
- Prawiranegara, Khalid., “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu,” *Lex Renaissance*, vol. 6, no. 3, 2021: 591-604.
- Purba, Erik Timoteus., Christine Wulandari, dan Samsul Bakri, “Kajian Hukum Kebijakan Energi Terbarukan Indonesia dan Realisasinya Menuju Tahun 2025,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 2, 2024: 390-404.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati., et.al., “Perbandingan Kebijakan Resiliensi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas Di Berbagai Negara,” *Foreign Legislation Analysis*, vol. 2, no. 1, 2024: 80–98.
- Quitow, Leslie., Weert Canzler, Philipp Grundmann, et.al., “The German Energiewende – What’s Happening? Introducing the Special Issue,” *Utilities Policy* 41, 2016: 1-16.
- Rahayu, Intan Angela., “Aspek Hukum Investasi Asing (Foregin Investment) dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia,” *Badamai Law Journal*, vol. 8, no. 1, 2023: 63-74.
- Rahim, Abdur., Silvi Aulia, et.al., “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, 2023: 5806-5811.
- Rahmanto, Faiz., “Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Asas Keadilan di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 2, 2025: 440-458.
- Rahmawati, Riska., “Enforcing Environmental Laws and the Public Interest Principle” *Eastasouth Proceeding of Interdisciplinary Research (EPIR)*, vol. 1, no. 1, 2023: 24-37.
- Rohinun, Fitria Nur Afifatur., Asyroh Mustajab Riyadly, et.al., “Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik,” *Staatsrecht: Jurnal dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023: 139-165.
- Sari, Indah., “Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian terhadap Bentuk Negara dalam Mewujudkan Otonomi Daerah,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2, 2015: 41-56.
- Siagian, Abdhy Walid., Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Habib Ferian Fajar, “Penerapan Konsep Forest City dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral pada Pembangunan Ibu Kota Negara,” *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 1, 2022: 1-12.
- Sianipar, Reinhard Jordan., Ralditiya Rifki Januar, and Stevay David Christian Silalahi, “Analisis Pemetaan Potensi Dan Realisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) Dengan Pemodelan Determinan Konsumsi Dan Metode Grouping Analysis EBT Di Indonesia,” *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, vol. 5, no. 2, 2024: 30–49.

- Simandjuntak, Reynold., “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 1, 2015: 57-67.
- Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 3, 2019: 524-557.
- Subekti, Rahayu., “Urgensi Regulasi Kendaraan Listrik Untuk Pengendalian Iklim Dan Penggunaan Energi Terbarukan (Analisis Komparatif Antara Indonesia, China, Dan Amerika Serikat),” *Jurnal RechtsVinding*, vol. 11, no. 3 2022: 435-450.
- Suwatno, Davira Syifa Rifdah., “Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 2, 2022: 328-337.
- Tauda, Gunawan A., “Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, no. 4, Nov 2018: 413-435.
- Taufiqurrahman, Faishal., Efendi Ibnu Susilo, et.al., “Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi negara dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kebijakan, dan Keputusan,” *Mimbar Yustitia*, vol. 5, no. 2, 2021: 91-114.
- Tampubolon, Manotar., dan Putu George Matthew Simbolon, “Perbandingan Sistem Hukum Inggris dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum dan Penerapan Hukum Indonesia),” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, vol. 5, no. 2, 2022: 141-161.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani., dan Ni’matul Huda, “Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjab,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, no. 3, vol. 29, 2022: 494-515.
- Widowati, Dyah Ayu., Heri Sutanta, Diyono, et.al., “Konsep AUPB untuk Keamanan Data dalam Standardisasi dan Sistem Geocoding Alamat Perkotaan dan Perdesaan Indonesia,” *Refleksi Hukum*, vol. 7, no. 2, 2023: 229-248, hlm. 231.
- Zamroni, Mohammad., “Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 36, no. 2, 2024: 495-518.
- Zitzer, Suzanne E., “Renewable Energy Policy and Wind Energy Development in Germany,” *UFZ Discussion Paper*, No. 8, 2009: 1-36.

C. Peraturan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609).

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102).
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113).
- Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 541).

D. Research Report

Warta Pemeriksa, Edisi 7, Vol. VI, Juli 2023.

Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia 2022

Second Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia 2025.

E. Internet

Agus Cahyono Adi K, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, “Pemerintah Kejar Target Tingkatkan Bauran EBT,”

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 18 Januari 2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-kejar-tingkatkan-bauran-ebt> diakses pada 5 Februari 2025, pukul 15.35 WIB.
- Agus Cahyono Adi K, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, “Menteri ESDM Ungkap Strategi Penuhi Target Bauran Energi Dari EBT,” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 15 Januari 2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-ungkap-strategi-penuhi-target-bauran-energi-dari-ebt>. Diakses pada 5 Februari 2025, pukul 16.26 WIB.
- CNBC Indonesia TV, “Trump Tarik AS Dari Perjanjian Paris, EBT RI Kena Getahnya?,” CNBC Indonesia, 11 Februari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250211092643-8-609632/video-trump-tarik-as-dari-perjanjian-paris-ebt-ri-kena-getahnya>. Diakses pada 13 Februari 2025, pukul 23.50 WIB.
- CR-27, “Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari,” Hukumonline, 22 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290/>. Diakses pada 16 Januari 2026, pukul 09.46 WIB.
- GDP Australia Tahun 2024 tercatat 60,082.01 US Dolar, Sumber: World Bank. <https://tradingeconomics.com/australia/gdp-per-capita-ppp>. Diakses pada 20 Januari 2026, pukul 10.20 WIB.
- GDP Indonesia Tahun 2024 tercatat 14,470.44 US Dolar, Sumber: World Bank. <https://tradingeconomics.com/indonesia/gdp-per-capita-ppp>. Diakses pada 20 Januari 2026, pukul 10.22 WIB.
- Humas Otorita Ibu Kota Nusantara, “Presiden Jokowi Groundbreaking Pembangunan PLTS IKN, Manfaatkan Energi Baru Terbarukan Di IKN,” Ibu Kota Nusantara, 3 November 2023, <https://www.ikn.go.id/presiden-jokowi-groundbreaking-pembangunan-plts-ikn-manfaatkan-energi-baru-terbarukan-di-ikn>. Diakses pada 5 Februari 2025, pukul 10.52 WIB.
- IESR, “Belajarlah Dari Jerman Yang Melakukan Transisi Energi Sebagai Proyek Lintas Generasi,” Institute Essential Services Reform, 17 Juli 2019, <https://iesr.or.id/generasi-muda-bicara-transisi-energi-di-indonesia-dan-jerman/>. Diakses pada 15 Februari 2025, pukul 08.23 WIB.
- Insi Nantika Jelita, “Bahlil Soal Paris Agreement: AS Saja Cabut, Kenapa Kita Lanjut?,” Media Indonesia, 30 Januari 2025, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/739358/bahlil-soal-paris-agreement-as-saja-cabut-kenapa-kita-lanjut>. Diakses pada 4 Februari 2025, pukul 23.38 WIB.
- Uliyasi Simanjuntak, “Indonesia Perlu Segera Tetapkan Peta Jalan Pengakhiran Dini PLTU Batubara,” Institute for Essential Services Reform, 6 November 2024, <https://iesr.or.id/indonesia-perlu-segera-tetapkan-peta->

[jalan-pengakhiran-dini-pltu-batubara/](#) diakses pada 25 September 2025, pukul 20.59 WIB.

Uliyasi Simanjuntak, “Peringkat Kebijakan dan Aksi Iklim Indonesia Turun di 2023,” Institute for Essential Services Reform, 31 Januari 2024 <https://iesr.or.id/peringkat-kebijakan-dan-aksi-iklim-indonesia-turun-di-2023> diakses pada 22 November 2024, pukul 11.06 WIB.

Uliyasi Simanjuntak, “RPP KEN Pangkas Target EBT Menjadi 19 Persen Di 2025,” Institute for Essential Services Reform, 31 Januari 2024, <https://iesr.or.id/rpp-ken-pangkas-target-ebt-menjadi-19-persen-di-2025/> diakses pada 12 Februari 2025, pukul 07.52 WIB.

Verda Nano Setiawan, 2025, “Bauran Energi Terbarukan RI Baru 14%, ESDM Ungkap Penyebabnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250131180048-4-607106/bauran-energi-terbarukan-ri-baru-14-esdm-ungkap-penyebabnya> diakses pada 6 Agustus 2025 pukul 19.11 WIB.